

MAKALAH
PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK LOW VISION

OLEH
AHMAD NAWAWI

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKLUTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG 2010

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK LOW VISION

Ahmad Nawawi
JURUSAN PLB FIP UPI

BAB I PENDAHULUAN

Di dunia ini semuanya tercipta dengan berpasang-pasangan. Kita perhatikan ada yang tinggi, maka ada pula yang pendek, ada yang cakep ada pula yang jelek, ada yang merem pasti ada juga yang melek. Ketika ada yang awas maka ada pula yang tunanetra.

Tunanetra adalah suatu kondisi di mana orang yang mengalaminya tidak bisa melihat, atau tidak bisa menggunakan penglihatannya secara baik dalam aktifitasnya sehari-hari. Agar bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan lancar tanpa mengalami banyak hambatan, maka tunanetra perlu menggunakan alat bantu asistif, yaitu alat bantu yang dapat memudahkan tunanetra dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Alat bantu asistif ini bisa dikatakan sebagai pengganti penglihatan. Sebagaimana orang yang pendek, ia menggunakan sepatu hak tinggi agar bisa menjadi kelihatan tinggi, walaupun ia tetap pendek. Orang yang kurang cantik menggunakan kosmetik agar kelihatan lebih cantik. Orang yang tinggi ketika ia melewati pintu yang pendek maka ia harus membungkuk agar bisa masuk, bukan kakinya yang harus dipotong, atau pintunya yang harus dirusak. Di dunia ini agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar perlu penyesuaian atau adaptasi.

Tunanetra apabila dibandingkan dengan orang awas, tentu saja ada perbedaan. Di dunia ini memang segalanya berbeda, anak kembar sekalipun pasti tetap ada perbedaannya. Oleh karena itu perbedaan antara orang awas dengan tunanetra dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Karena antara orang awas pun kalau kita cari perbedaannya pasti juga ada

perbedaannya. Tunanetra apabila dicari persamaannya dengan orang awas/non-tunanetra, tentu saja ada persamaannya. Dan pasti ada persamaannya. Bahkan persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Bagaimana kita melihat sebuah *whiteboard* yang berukuran 3X1,5 m, lalu di *whiteboard* itu ada sebuah titik kecil berwarna hitam, maka itulah gambaran perbedaan antara tunanetra dengan orang awas/non-tunanetra, jadi perbedaannya sangat kecil apabila dibandingkan dengan persamaannya. Dapat dikatakan bahwa orang tunanetra dan orang awas lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya.

Pertanyaannya adalah mengapa tunanetra seringkali diperlakukan berbeda? Mengapa kebanyakan orang memperlakukan tunanetra dengan cara yang berbeda? Mengapa mereka disisihkan? Mengapa mereka termarginalkan? Mengapa mereka sulit memperoleh pendidikan di sekolah reguler? Mengapa mereka sulit mendapatkan pekerjaan? Mengapa mereka sulit menjadi nasabah di sebuah bank? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu.

Ketika tunanetra mendaftarkan diri ke sekolah reguler (sekolah untuk anak-anak awas/non-tunanetra), serta merta ditolak. Dianggap salah masuk dan digiring ke Sekolah Luar biasa (SLB), yaitu sekolah khusus untuk anak-anak penyandang cacat termasuk tunanetra, padahal lokasi SLB letaknya sangat jauh dari rumahnya. Sementara anak-anak awas bebas memilih sekolah di mana saja, dan kapan saja, serta yang paling dekat dari rumahnya sekalipun. Pergi ke SLB memerlukan waktu yang lama dan biaya transportasi yang mahal. Sedangkan masuk ke sekolah manapun adalah hak azasnya. Siapa pun tidak bisa menghalanginya. Ia ditolak oleh sekolah karena ketunanetraannya. Jadi, untuk diterima di sebuah sekolah, seorang tunanetra perlu perjuangan yang berat.

Seorang tunanetra dengan membawa bekal ijazahnya, ia melamar calon PNS atau karyawan di sebuah perusahaan. Serta merta ditolak, karena syarat menjadi PNS atau karyawan adalah sehat jasmani dan rohani. Tunanetra dianggap tidak sehat jasmaninya alias orang sakit. Padahal tunanetra adalah suatu kondisi tidak bisa melihat dan dia bukan orang sakit. Ketika ada seorang karyawan di sebuah perusahaan yang besar, lalu orang tersebut tiba-tiba mengalami musibah dan berakhir dengan ketunanetraan, maka serta merta perusahaan tersebut mem-PHK-nya. Ini sangat tragis dan tidak adil. Karena kehilangan penglihatannya, ia juga harus kehilangan pekerjaannya, berarti ia juga harus kehilangan sumber nafkahnya. Padahal orang hidup perlu makan, lama-lama ia juga harus kehilangan nyawanya. Artinya yang tunanetra tidak boleh hidup di muka bumi. Kejam amat dunia ini. Bagaimana kalau yang mem-PHK tersebut yang menjadi tunanetra? Orang memandang tunanetra sebelah mata, orang memandang tunanetra dari sisi perbedaannya dan bukan dari

sisi persamaannya.

Apabila kita memandang tunanetra dari sisi persamaannya, maka berarti tunanetra juga mengalami fase dan tahap-tahap perkembangan sebagaimana orang yang awas/non-tunanetra lainnya. Tunanetra memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tunanetra memiliki indra selain mata yang bisa dikembangkan keberfungsian. Tunanetra memiliki kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Tunanetra memiliki cita-cita yang harus diraih, dan lain sebagainya, masih banyak lagi.

Pada hakekatnya yang ada pada orang awas, pasti ada juga pada diri tunanetra. Yang dimiliki orang awas pasti juga dimiliki oleh orang tunanetra. Jadi potensi yang dimiliki orang awas pasti dimiliki juga oleh tunanetra, kebutuhan yang dimiliki oleh orang awas pasti juga merupakan kebutuhan tunanetra. Artinya tunanetra pun juga memiliki potensi yang harus dikembangkan dan memiliki ketubuhan yang dipenuhi. Oleh karena itu kita harus belajar melayani dan mendidik anak tunanetra sebagaimana kita melayani dan mendidik anak-anak awas/non-tunanetra.

Permasalahannya adalah, apakah selama ini kita telah melayani dan mendidik anak-anak tunanetra secara proporsional? Artinya kita melayani dan mendidik anak tunanetra sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang pembimbing dan pendidik. Sudahkah kita memposisikan dan menempatkan anak tunanetra sebagai peserta didik sebagaimana kita menempatkan dan mendidik anak-anak awas/non-tunanetra? Apakah proses pembelajaran kita telah mengakomodasi peserta didik tunanetra? Apakah materi dan metoda mengajar telah kita sesuaikan dengan peserta didik tunanetra? Atau apakah anak tunanetra yang menyesuaikan materi dan metode mengajar? Apakah system pendidikan sudah menyesuaikan peserta didik tunanetra, atautkah anak tunanetra yang harus menyesuaikan system pendidikan? Masalah-masalah tersebut seringkali muncul di lapangan. Jika hal tersebut tidak diupayakan solusinya, maka kapan tunanetra bisa menikmati hak azasnya dan hak hidupnya. Padahal kita tahu dan sadar bahwa mereka juga manusia yang memerlukan kebahagiaan dalam hidupnya. Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas, pendidikan inklusi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF ANAK LOW VISION

A. **Konsep Pendidikan Inklusif**

1. Sejarah Pendidikan Inklusif

Pendidikan sebagai hak untuk semua anak telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional mulai dari Deklarasi Universal 1948. Instrumen-instrumen selanjutnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, termasuk anak penyandang cacat, sangat rentan untuk dikepinggirkan. Hak untuk memperoleh pendidikan di dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan telah disorot dalam instrumen-instrumen yang lebih rinci seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Namun, hak atas pendidikan tidak secara otomatis mengimplikasikan inklusi.

Hak atas Pendidikan Inklusif yang paling jelas telah dinyatakan dalam Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi yang menekankan bahwa sekolah membutuhkan perubahan dan penyesuaian.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan pada bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.”

2. Paradigma Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif lahir dari perubahan trend dalam kebijakan sosial dan perubahan paradigma sistem pendidikan di beberapa negara di dunia. Anak pada awalnya dibedakan antara yang “normal” dan “tidak normal” dalam layanan pendidikan. Dalam paradigma pendidikan inklusif, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sehingga sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan anak secara individual.

Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar.

Deklarasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Thailand yang menyatakan bahwa setiap anak wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya; dan Deklarasi Bandung yang menyatakan kesiapan Indonesia

menuju inklusi. Pada Deklarasi Bandung tahun 2004 dijelaskan bahwasanya anak berkebutuhan khusus di Indonesia mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

Di Indonesia pendidikan inklusif dipayungi oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Warga negara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, mereka yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual dan sosial. Selanjutnya secara operasional di lapangan didukung oleh Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Berdasarkan ketiga sistem pendidikan di atas terjadi pergeseran paradigma berkaitan dengan kedudukan anak dalam konteks pendidikan. Pada sistem pendidikan sebelumnya anak dibagi berdasarkan ciri-ciri fisik atau kecacatan yang melekat pada individu anak. Sedangkan dalam paradigma pendidikan inklusif setiap anak dipandang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tanpa menitikberatkan pada karakteristik fisik atau kecacatan yang melekat pada individu anak. Sehingga sistem pendidikan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dan bukan anak yang menyesuaikan sistem. Bagaikan orang memakai baju, lalu baju tersebut terlalu kecil sehingga sempit dan tidak cukup di badan. Maka bukan badannya yang dipangkas agar sesuai dengan ukuran baju, tetapi bajunya yang harus dirombak sehingga cukup di badan.

Melalui pendidikan inklusif diharapkan semua anak mendapatkan pengakuan dan kesamaan hak, semua anak berkembang sesuai dengan potensinya dan terakomodasi semua kebutuhannya, termasuk anak tunanetra dan lebih khusus lagi anak low vision.

3. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah Layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak non-ABK usia sebayanya di kelas reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Proses pembelajaran lebih bersifat

kooperatif dan kerjasama yang *'join in'* diantara peserta didik sebagai anggota kelas, mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam melaksanakan tugas dan layanan sekolah.

Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal satu ...yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

UNESCO 1994 dalam Alimin (2008: 7), memberikan gambaran bahwa:

Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan *one school for all*.

Pendidikan inklusif merupakan ideologi atau cita-cita yang ingin kita raih. Sebagai ideologi dan cita-cita, pendidikan inklusif harus menjadi arah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan inklusif tidak diartikan sebagai model pendidikan atau pendekatan pendidikan yang memasukkan anak penyandang cacat ke sekolah regular semata-mata. Melainkan merupakan system pendidikan dan sekolah ramah yang dapat mengakomodasi kebutuhan setiap anak sebagai peserta didik. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif ini, adalah sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, yang kelak diharapkan bisa memberi jaminan bahwa strategi nasional tentang "Pendidikan Untuk Semua" (PUS) benar-benar dimiliki semua kalangan, tidak membedakan apakah mereka tergolong anak-anak berkelainan atau tidak. (Saptono: 2006)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih

dan atau profesional di bidangnya agar dapat menyusun program pendidikan yang disesuaikan dan obyektif. Jadi pendidikan inklusif tidak semata-mata memasukkan anak penyandang cacat ke sekolah reguler, tetapi mencakup bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran di kelas, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

Adapun sekolah inklusif menurut Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang mengakomodasi semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

4. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif

Prinsip pendidikan inklusif yaitu:

a. Prinsip Persamaan Hak dalam Pendidikan (*Equality in Education*)

Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak mendapatkan pendidikan. Memperoleh pendidikan yang bermutu, menghargai keragaman, dan mengakui perbedaan individual. Setiap anak berhak untuk memasuki sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya; semua anak bisa belajar dan menghadapi hambatan dalam belajar; semua anak membutuhkan dukungan dalam proses belajar; dan pembelajaran memfokuskan pada kebutuhan setiap individu anak.

b. Peningkatan Kualitas Sekolah (*School Improvement*)

Konsep sekolah dan pendidikan bukan hanya terfokus pada sekolah formal, namun institusi-institusi non formal lainnya; sebuah institusi pendidikan atau sekolah merupakan institusi yang ramah dan responsif terhadap perubahan; selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, kemampuan guru dan yang paling mendasar adalah merubah pandangan sekolah tentang kebutuhan anak, melakukan kerjasama dengan institusi terkait sebagai rekan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan mewujudkan sebuah sekolah yang ramah terhadap anak sehingga anak merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebayanya.

Sistem Sekolah Ramah Anak (SRA) menekankan pada pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan gaya belajar setiap anak; mengajar anak bagaimana belajar kooperatif, aktif, dan demokratis. Isi materi yang terstruktur dengan sumber daya yang berkualitas baik dan melindungi anak dari pelecehan dan bahaya kekerasan. Dengan demikian pendidikan inklusif dapat meningkatkan kualitas sekolah, baik dari segi layanan, materi, dan peserta didik, karena dapat mengakomodasi kepentingan setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

c. Tujuan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
- 3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
- 4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
- 5) Memenuhi amanat konstitusi/peraturan perundang-undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”;
 - b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 yang menegaskan “anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

- e) Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

5. Landasan Pendidikan Inklusif

a. Di dunia

Pendidikan Inklusif sebagai Hak Asasi Manusia. Berikut ini adalah Instrumen-instrumen Internasional yang relevan dengan Pendidikan Inklusif:

- 1) 1948: Deklarasi universal hak asasi manusia;
- 2) 1989: Konvensi PBB tentang hak anak;
- 3) 1990: Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua, Jomtien;
- 4) 1993: Peraturan standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat;
- 5) 1994: Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus;
- 6) 1999: Tinjauan 5 tahun Salamanca;
- 7) 2000: Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia, Dakar;
- 8) 2000: Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada penurunan angka Kemiskinan dan Pembangunan;
- 9) 2001: Flagship Pendidikan Untuk Semua (PUS) tentang Pendidikan dan Kecacatan. (Sue Stubbs, 2003: 15)

b. Di Indonesia

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar, yang disebut “Bhineka Tunggal Ika”.

Falsafah ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia Indonesia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan

kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb.

Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, etnis, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini. Misi menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan atau anak berkebutuhan khusus (ABK) hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, etnis, bahasa, budaya, dan atau agama. Di dalam diri individu ABK pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu non-ABK pasti terdapat juga kekurangan tertentu, karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi lemah dan berkeluh kesah. Kekurangan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, ataupun agama, namun menjadi hasanah kekayaan hidup yang bermartabat dan saling menghargai.

Kondisi tersebut harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Landasan Yuridis

Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif di jamin oleh UUD '45 (amandemen) pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”; pasal 5 ayat (2): “Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”; pasal 5 ayat (4): “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.” Pasal 15 yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional.

3) Landasan Paedagogis

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa

tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

4) Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *the National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

Layanan ini menyarankan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).

B. Anak low vision

1. Prevalensi

Orang awam menganggap bahwa semua penyandang tunanetra adalah buta atau orang yang tidak dapat melihat sama sekali. Hal ini tidak benar, karena 80% tunanetra masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional artinya masih bisa digunakan untuk keperluan aktifitas sehari-hari. Sisa penglihatan yang fungsional ini bisa dirangsang dan dilatih agar dapat digunakan paling tidak dapat membantu mobilitasnya.

Menurut Willis, tahun 1976, (Hallahan dan Kaufman, 1991) menemukan bahwa hanya 18% dari mereka yang didefinisikan sebagai buta secara legal adalah buta total dan harus mempergunakan Braille sebagai media bacanya. Ini merupakan informasi yang penting terutama bagi negara-negara di mana semua – atau kebanyakan anak

tunanetra hanya diajari membaca Braille. Berarti sisanya sebanyak 82% adalah low vision yang tidak menggunakan Braille.

Pada tahun 1994, WHO memperkirakan bahwa terdapat sekitar 38 juta kasus kebutaan di seluruh dunia dan sekitar 110 juta kasus kurang awas yang sejumlah di antaranya menghadapi resiko menjadi buta. Jadi, penyandang ketunanetraan global diperkirakan berjumlah 148 juta orang. Prevalensi kebutaan diperkirakan 0,7% dari seluruh populasi dunia, berkisar dari 0,3% di negara-negara maju dan bekas negara-negara sosialis Eropa hingga 0,6% di Cina, 1% di India, 1,4% di Afrika Sub-Sahara. (Depsos RI, 2003: 5)

Berdasarkan hasil penelitian, 60% dari tunanetra ternyata masih mampu menggunakan sisa penglihatannya untuk membaca dan menulis huruf pika/awas ukuran 12 atau lebih besar. Baik menggunakan alat bantu penglihatan seperti kaca mata dan alat pembesar lainnya maupun tanpa alat bantu penglihatan. Dengan demikian tidak semua tunanetra memerlukan tulisan Braille dalam pendidikannya. Sedangkan menurut SKRT 2001 yang dimuat dalam harian umum "Kedaulatan Rakyat" mengemukakan bahwa "Proporsi low vision (penglihatan terbatas) di Indonesia adalah sebesar 4,8% (Asia 5-9%), kebutaan 0,9% dan katarak (1,8%) yang meningkat dari 1,2%".

Keberadaan penyandang low vision sangat menyebar di daerah yang sangat luas. low vision bisa dialami oleh siapa pun dan kapan pun. Bisa terjadi ketika masih bayi atau balita, anak, remaja, dan orang dewasa atau tua. Penyandang low vision bisa datang dari keluarga miskin ataupun kaya. (Hosni, 2007: 7)

Diperkirakan 45 juta orang di dunia ini buta dan tiga kali dari jumlah tersebut (135 Juta) menyandang low vision. Jadi diperkirakan ada 180 juta orang di dunia ini menyandang tunanetra. "Jumlah penyandang low vision tiga kali lipat dari yang tergolong buta, dan selama ini belum mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya." (Hosni, 2007: 11)

Menurut Hosni, "di Indonesia memang tidak ada data yang bisa dipakai, tetapi hasil penelitian di Indonesia jumlah anak low vision jumlahnya cukup besar. Dalam tulisan yang berjudul tentang "Program penanggulangan Penyandang low vision" DR. Dr. Salamun (Januari 1996) mengungkapkan data hasil penelitian sebagai berikut":

- a. Penelitian di RSUD Dr. Sutomo Surabaya tahun 1986

Kemungkinan penyandang low vision pada kelompok umur sekolah yaitu antara umur 5-20 tahun adalah 3,12 % dari seluruh pengunjung.

Angka kesakitan mata adalah 18 %, sedangkan kelompok umur 5 – 20 tahun di Indonesia sebanyak 31.500.000. Dengan demikian penyandang low vision pada kelompok usia sekolah diperkirakan ada $1,12\% \times 18\% \times 31.500.000 = 175.274$ anak umur sekolah.

b. Penelitian Di Bandung tahun 1987

Diperoleh data kemungkinan penyandang low vision pada murid kelas 1 SD. Adalah 1,56%. Maka Kota Bandung diperkirakan ada 600 anak yang mengalami low vision di kelas 1 SD. Bila diproyeksikan, anak SD kelas I ada 4.500.000 maka penyandang low vision diperkirakan adalah 70.200 anak.

c. Penelitian di Jakarta tahun 1995

Pada pemeriksaan murid SD, SMP, SMA secara acak di daerah Jakarta utara diperoleh data anak yang mengalami low vision sebesar 1,5%.

Pada pemeriksaan murid SLB/A di Jakarta Selatan diperoleh data bahwa 50% muridnya memiliki penglihatan bila dikoreksi dengan kaca mata biasa dapat membaca lebih baik tanpa instrumen khusus untuk membaca. Sedangkan bila diberikan instrumen baca yang khusus, anak tersebut lebih meningkat lagi kemampuan membacanya.

Menurut William G. Brohier, seorang consultan pendidikan dan Rehabilitasi Christoffel-Blindenmission (CBM) Germany untuk Asia, dalam papernya pada CBM Indonesian Partners Meeting yang berjudul "*Special Needs Education*" mengungkapkan bahwa berdasarkan data WHO anak umur 7-15 tahun yang tergolong buta adalah 260 orang per satu juta penduduk.

Di samping itu penjarangan dan survey yang dilakukan oleh mahasiswa PLB FIP UPI Bandung setiap tahun di beberapa kecamatan di provinsi Jawa Barat diperoleh data ABK berkisar antara 50 sampai 75 di setiap kecamatan. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 5 sampai 7 anak low vision. Data dan fakta tersebut di atas merupakan angka yang fantastis dan perlu dipersiapkan untuk pelayanannya.

2. Pengertian low vision

Low vision adalah tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan yang

fungsional atau masih dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari. Untuk mengetahui seseorang low vision atau bukan, perlu diketahui terlebih dahulu ciri-ciri penglihatan yang sempurna. Menurut dr. Sugiarti ciri-ciri penglihatan yang sempurna adalah:

- a. Mampu melihat jauh dan dekat;
- b. Lapang pandang luas ($\pm 180^\circ$);
- c. Mampu membaca dengan cepat dengan jarak membaca sekitar 30 cm;
- d. Dapat dinilai dengan kemampuan besarnya huruf yang terbaca (6/6) atau (20/20);
- e. Sensifitas cahaya;
- f. Mampu menginterpretasi warna;
- g. Memiliki kemampuan akomodasi;
- h. Memiliki pergerakan mata dan keseimbangan otot;
- i. Memiliki kemampuan penglihatan stereoskopik

Adapun kriteria penglihatan buram adalah:

- a. Penglihatan jauh/dekat terganggu;
- b. Lapang pandang menyempit, hanya sebagian;
- c. Mengalami silau;
- d. Buram pada cahaya yang remang-remang;
- e. Tulisan bisa terlihat apabila menggunakan warna yang kontras;
- f. Seperti melihat kabut/awan;
- g. Terjadi penglihatan ganda;
- h. Apabila membaca, huruf terlihat miring.

(dr. Sugiarti, 2008:3)

Bagaimana kita mengetahui seseorang penglihatannya terganggu?

Hal ini bisa diketahui melalui:

- a. Bisa dilihat adanya kelainan pada kelopak mata, matanya kecil atau menonjol, korneanya keruh, dll;
- b. Nampak adanya kelainan pada matanya, seperti: apabila menonton TV harus mendekatkan matanya ke TV, apabila melihat jauh matanya harus dipicingkan, jarak

membaca kurang dari 30 cm yaitu sekitar 5 cm;

c. Suka menabrak-nabrak.

Kondisi tersebut mengindikasikan seseorang mengalami low vision. Indikasi low vision adalah:

- 1) Ketajaman penglihatan antara 0,3 – 1/~
- 2) Lapang pandang < 10 derajat dari titik pusat
- 3) Setelah dilakukan pengobatan maksimal dengan operasi dan koreksi kacata, namun kondisi penglihatan tidak membaik
- 4) Kejadiannya sudah terlanjur sehingga tidak dapat dilakukan apa-apa lagi.

(dr. Sugiarti, 2008:4)

Berdasarkan asesmen dengan Snellen Chart, anak tunanetra pembaca braille memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 3/60, sedangkan pembaca tulisan besar yang oleh WHO diklasifikasikan sebagai *low vision* (Mason, 1999 dalam Didi, 2002: 13)

Low vision dapat didefinisikan secara legal dan pendidikan. Definisi legal mengacu kepada tingkat kelainan yaitu ketajaman penglihatan dan lantang pandang. Seseorang tergolong low vision jika ketajaman penglihatannya antara 20/170 dan 20/200 setelah mendapat perbaikan dan koreksi dengan kacamata. Low vision berdasarkan definisi legal menurut WHO, batas kemampuan penglihatannya lebih rendah yaitu bahwa orang low vision memiliki ketajaman penglihatan yang sama dengan atau lebih baik dari 3/60 (0.05) pada mata yang lebih baik setelah mendapat koreksi terbaik yang memungkinkan.

Adapun definisi pendidikan adalah mereka yang mengalami kelainan penglihatan sedemikian rupa tetapi masih dapat membaca huruf yang dicetak besar dan tebal baik menggunakan alat bantu penglihatan maupun tidak (Juang Sunanto, 1999: 2-3)

WHO menetapkan definisi kerja tentang low vision sebagai berikut:

A person with low vision is one has impairment of visual functioning even after treatment and/or standard refractive correction, and has a visual acuity of less than 6/18 (20/60) to light perception or a visual field of less than 10 degree from the point of fixation, but who uses or is potentially able to use, vision for the planning and/or execution of a task.

Berdasarkan pengertian WHO di atas tentang low vision dapat ditangkap hal sebagai berikut:

- 1) Setelah diobati dan dikoreksi dengan kacamata, masih memiliki kelainan pada fungsi penglihatannya;
- 2) Ketajaman penglihatan 6/18 (20/60) sampai persepsi cahaya;
- 3) Lintang pandangnya kurang dari 10 derajat;
- 4) Dapat menggunakan atau berpotensi untuk menggunakan sisa penglihatannya dalam merencanakan dan melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Alat Bantu low vision

Menurut Bennett, D. (1999) dalam bukunya yang berjudul "*low vision Devices for Children and Young People with a Visual Impairment*" dalam Mason, H. & McCall, S. (Eds.) terjemahan Didi Tarsidi, alat bantu low vision antara lain:

a. Cahaya,

Alat bantu low vision yang paling efektif adalah cahaya. Cahaya merupakan alat bantu low vision pertama yang harus dipertimbangkan, dibahas dan diasesmen dalam konsultasi low vision. Jika tingkat iluminasi (pencahayaannya) lingkungan rendah, dan cahaya lampu yang ada tidak cukup terang, maka sebaiknya dipergunakan lampu belajar yang dapat diputar ke segala arah, sebaiknya dengan watt yang rendah.

b. Standar Baca (*reading stand*)

Terdapat bermacam-macam model standar baca untuk dipergunakan dengan alat bantu low vision. Standar baca itu harus dilengkapi dengan alat

untuk mengubah-ubah ketinggiannya dan kebesaran sudutnya.

c. Alat-alat Magnifikasi

1) Alat Magnifikasi Genggam

2) Magnifikasi Berdiri

Pada jenis yang berdaya tinggi, alat magnifikasi ini biasanya dilengkapi dengan lampu sehingga permukaan bahan bacaan menjadi terang.

3) Alat Magnifikasi Tidur (*Flat Bed Magnifier*)

4) Alat Magnifikasi Garis (*line magnifier*)

5) Alat Magnifikasi dengan Bingkai Kaca Mata

6) Alat Magnifikasi Teleskopik

7) Teleskop dengan Jarak Fokus Tertentu

8) Closed circuit television (CCTV)

4. Penilaian Penglihatan Fungsional bagi low vision

Keterampilan penglihatan yang digunakan untuk penglihatan fungsional ditampilkan di sini berurutan sesuai dengan urutan penilaian.

Seorang anak low vision mungkin tidak dapat terus mengikuti semua langkah tanpa latihan khusus. Beberapa keterampilan mungkin tidak dapat dicapai (misalnya tracking benda bergerak) tapi orang itu masih dapat terus melanjutkan ke langkah berikutnya.

Ada 7 (tujuh) keterampilan yang harus dinilai dan bagaimana menggunakannya. Keterampilan penglihatan ini digunakan untuk melakukan tugas sehari-hari.

Tujuh keterampilan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesadaran dan perhatian terhadap benda. Mencari sebuah benda atau target dan melihat pada benda itu (fixating) cukup lama untuk menyadari atau mengenalinya.
Alasan untuk penilaian : Apakah anak itu dapat melihat benda yang dekat dengannya? Apakah dia mencari benda dengan penglihatannya atau dengan tangannya (meraba)? Apa yang membuat benda itu lebih mudah atau lebih mungkin dilihat? Hal-hal yang mempengaruhi mudahnya benda didapati atau dikenali adalah: ukuran, jarak, kontras dan cahaya. Jika benda sudah diketahui, maka lebih mudah untuk mengenalinya.
- b. Kontrol gerakan mata (*tracking*).

Dapat mengikuti benda bergerak dengan gerak mata atau kepala.

Alasan untuk penilaian : Dapatkah orang itu mengikuti gerakan benda tanpa "kehilangan" arah? Arah gerakan yang berbeda harus dicoba: atas dan bawah, sisi ke sisi, miring dan ke depan, dan belakang.

Gerakan itu mungkin dibuat orang atau binatang yang sedang berlari atau sesuatu yang dijatuhkan ke lantai atau digulirkan. *Tracking* diperlukan untuk mengikuti gerak lalu-lintas. *Tracking* orang atau benda (seperti bola) diperlukan untuk bermain.
- c. Kontrol gerakan mata (*scanning*).

Menggerakkan mata dengan tepat dari satu benda ke benda lainnya.

Alasan untuk penilaian: Beberapa orang yang kurang awas (low vision) harus mencari ke sekelilingnya untuk waktu yang lama sebelum dapat menemukan benda. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan untuk mengalihkan pandangan dari benda dekat ke benda yang lebih jauh.

Keterampilan '*scanning*' diperlukan untuk mencari orang atau benda di lingkungan penglihatan.

Contohnya: mencari sebuah toko tertentu di pasar.

d. Membedakan benda

Pengenalan benda-benda dari garis besar atau bentuk umumnya.

Alasan untuk penilaian: Untuk mempelajari apakah orang itu dapat membedakan antara orang dan benda, mengenali benda yang sudah diketahui, mengenali benda-benda serupa atau berlainan.

Benda dapat dibedakan berdasarkan warna, bentuk, kontras, posisi atau ukuran. Misalnya berbagai makanan di pasar. Perincian di dalam benda tidak perlu terlihat. Seseorang dapat melihat sebuah benda dan mengitarinya tanpa menabrak atau terjatuh. Benda besar atau kecil dapat memberikan petunjuk bagaimana dan di mana harus bergerak dengan aman. Pohon atau pintu dapat memberi petunjuk arah.

e. Membedakan perincian untuk mengenali tindakan dan mencocokkan benda

Membedakan perincian untuk mengenali benda lebih sukar daripada melihat benda itu sendiri. Ciri-ciri benda harus dikenali.

Alasan untuk penilaian: Pada umumnya, proses belajar terjadi melalui penglihatan dan dengan meniru. Penting untuk mengetahui apa yang dapat dilihat dan bagaimana lingkungan (seperti penerangan) mempengaruhi apa yang dapat dilihat. Faktor jarak, ukuran, warna dan kontras sangat penting.

Untuk berhubungan dengan orang, penglihatan memberikan keterangan berharga untuk mengenali orang, dan mengetahui ekspresi dan gerakan badan pada saat tidak ada suara.

f. Membedakan perincian pada gambar

Mendapat keterangan melalui gambar. Gambar itu mungkin garis besar atau gambar kompleks dan terperinci. Bagian-bagian terpenting pada gambar harus dikenali sehingga arti dari gambar tersebut dapat dimengerti.

Alasan untuk penilaian: Gambar memberikan keterangan berarti pada poster, iklan atau di buku. Gambar benda mungkin sulit untuk ditemukan dan dikenali.

Mengenali gambar. Gambar digunakan untuk memberikan keterangan dan perintah

seperti pada poster pendidikan kesehatan. Mereka lebih mudah dikenali jika tampak seperti benda sebenarnya dan mempunyai garis besar yang jelas. Kadang-kadang sukar untuk menemukan suatu benda pada gambar jika terdapat banyak perincian dan ada banyak benda lain di gambar itu.

g. Mengenali dan persepsi pola hurup, angka dan kata

Mencocokkan hurup dan angka menurut ciri-ciri yang sama atau berbeda. Keterampilan ini tidak memerlukan kemampuan membaca tapi penting untuk keterampilan membaca.

Alasan untuk penilaian: Untuk mengetahui apakah seseorang dapat membedakan bentuk dan kata-kata yang sama dan yang berlainan. Hasilnya akan membantu dalam membuat keputusan apakah seseorang harus menggunakan cetakan biasa, cetakan besar, alat-alat bantu kurang awas (low vision) atau mungkin memerlukan Braille.

5. Latihan Pengembangan Penglihatan Fungsional

Latihan-latihan yang perlu diberikan kepada anak low vision, antara lain:

- a. Kesadaran Visual;
- b. Perhatian Visual;
- c. Memusatkan Penglihatan;
- d. Gerakan Visual;
- e. Diskriminasi visual *Vigur Ground*;
- f. *Visual Closure*
- g. *Ingatan Visual*
- h. *Koordinasi mata-tangan, mata-kaki, dll*

6. Pendidikan Inklusif bagi Anak low vision

Didasarkan pada pemikiran bahwa inovasi dan pembaharuan layanan bagi low vision akan berkembang dan berkesinambungan bila telah diterjemahkan ke dalam budaya yang kita miliki dan tidak terlepas (*exclusive*) dari sitem yang sudah ada.

Terlayaninya pendidikan seluruh anak *low vision* dalam kontek Pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang bernuansa inklusif, ada empat aspek yang harus dirancang dan

digarap secara terpadu yaitu: (a) bagaimana menjaring anak low vision; (b) bagaimana layanan rehabilitasinya, (c) bagaimana bentuk dan model pendidikannya; dan (d) bagaimana menyiapkan tenaga professional di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Prestasi belajar penyandang low vision lebih rendah dari mereka yang tergolong buta dan sering dianggap malas, hal ini sebagai akibat dari pelayanan pendidikan yang diberikan kepada penyandang *low vision* disamakan dengan yang tergolong buta yaitu menggunakan huruf Braille. (Hosni, 2007:6)

Mengapa hal tersebut terjadi? Mungkin ada yang salah dalam pendekatan dan sistem pendidikannya. Boleh jadi layanan pendidikan bagi anak *low vision* yang tidak tepat dan tidak proporsional. Oleh karena itu, dalam hal ini kehadiran pendidikan inklusif bagi anak *low vision* diharapkan menjadi solusi terbaik bagi layanan pendidikannya dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara optimal.

Menurut Didi Tarsidi dalam artikelnya yang berjudul “*Dari Segregasi menuju Inklusi*” mengungkapkan bahwa “Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inklusi siswa penyandang cacat (dari bermacam-macam kategori kecacatan dengan berbagai tingkat kecacatannya) ke dalam kelas reguler berhasil dengan baik bila didukung oleh faktor-faktor berikut ini”:

a. Sikap dan keyakinan yang positif

Guru reguler yakin bahwa siswa penyandang cacat akan berhasil, apabila:

1) Kepala sekolah merasa bertanggung jawab atas hasil belajar siswa

penyandang cacat;

2) Seluruh staf dan siswa sekolah yang bersangkutan telah

dipersiapkan untuk menerima kehadiran siswa penyandang cacat;

3) Orang tua anak penyandang cacat terinformasi dan mendukung

tercapainya tujuan program sekolah;

4) Guru pembimbing khusus memiliki komitmen untuk berkolaborasi

dengan guru reguler di kelas;

b. Tersedia program untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa

penyandang cacat

Untuk siswa *low vision*, program ini mencakup latihan pengembangan penglihatan fungsional, orientasi dan mobilitas, keterampilan kehidupan sehari-hari (ADL), dan keterampilan sosial.

- c. Tersedia peralatan khusus dan teknologi asistif untuk mengakses program kurikuler

Bagi siswa *low vision*, ini mencakup alat-alat bantu *low vision* seperti magnifer, large print, komputer bicara, dan sebagainya.

- d. Lingkungan fisik diadaptasikan agar lebih aksesibel bagi siswa penyandang cacat

Bagi siswa *low vision*, adaptasi tersebut mencakup penyediaan fasilitas dengan kontras dan warna yang mencolok untuk memudahkan mereka mengorientasi lingkungan dan memudahkan dalam mobilitas di lingkungan sekitar.

- e. Dukungan sistem

Kepala sekolah memahami kebutuhan khusus siswa penyandang cacat, seperti:

- 1) Tersedia personel dengan jumlah yang cukup, termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga pendukung lainnya.
- 2) Terdapat upaya pengembangan staf dan pemberian bantuan teknis yang didasarkan pada kebutuhan personel sekolah (misalnya pemberian informasi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecacatan, metode pengajaran, kegiatan kampanye kesadaran dan penerimaan bagi para siswa, dan latihan keterampilan kerja tim).
- 3) Terdapat kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap siswa penyandang cacat, termasuk untuk asesmen dan evaluasi hasil belajar.

- f. Kolaborasi

Guru pembimbing khusus menyiapkan program pengajaran individualisasi (*individualized educational program*) bagi siswa penyandang cacat, dan merupakan bagian dari tim pengajar di kelas reguler. Pendekatan tim dipergunakan untuk pemecahan masalah dan implementasi program. Guru reguler, guru pembimbing khusus dan spesialis lainnya berkolaborasi (misalnya dalam co-teaching, team teaching, teacher assistance teams).

g. Metode pengajaran

Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memilih dan mengadaptasikan materi pelajaran dan metode pengajaran menurut kebutuhan khusus setiap siswa. Dipergunakan berbagai strategi pengelolaan kelas (misalnya team teaching, cross-grade grouping, peer tutoring, teacher assistance teams). Guru menciptakan lingkungan belajar kooperatif dan mempromosikan sosialisasi bagi semua siswanya.

h. Dukungan masyarakat

Masyarakat menyadari bahwa anak penyandang cacat merupakan bagian integral dari masyarakat tersebut. Terdapat organisasi penyandang cacat yang aktif melakukan advokasi dan kampanye kesadaran masyarakat, dan berfungsi sebagai wahana untuk mempertemukan anak dengan orang dewasa penyandang cacat sebagai model guna memperkuat prestasi belajarnya.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak *low vision* adalah golongan dari anak tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan fungsional, artinya sisa penglihatannya masih dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pendidikan. Agar sisa penglihatan ini dapat digunakan secara efektif dan optimal maka perlu adanya penilaian dan latihan pengembangan sisa penglihatan fungsional. Sekecil apapun sisa penglihatan harus digunakan secara lebih banyak. Mereka menggunakan tulisan pika cetak tebal yang berukuran besar (18) atau lebih.
2. Jumlah anak *low vision* di Indonesia cukup besar, namun yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisinya masih sangat kecil.
3. Layanan pendidikan bagi anak *low vision* masih tergolong baru dan masih jauh dari apa yang diharapkan. Sementara ini layanan pendidikan bagi anak *low vision* cenderung disamakan dengan anak buta total.
4. Prestasi belajar anak *low vision* cenderung lebih rendah dari mereka yang tergolong buta dan anak awas/non-tunanetra. Anak *low vision* sering dianggap malas. Padahal mereka bukan pemalas. Anggapan ini muncul, karena layanan dan pendekatan dalam pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan melihat anak *low vision*.
5. Anak *low vision*, apabila diberi layanan pendidikan secara profesional dan proporsional mereka akan dapat mencapai prestasi yang maksimal sebagaimana anak non-*low vision* lainnya. Mereka sebenarnya bukan pemalas dan selalu berprestasi rendah.
6. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan

kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan.

7. Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak *low vision*. Dengan sistem pendidikan inklusif diharapkan layanan pendidikan bagi anak *low vision* tidak mengalami salah layanan.
8. Layanan pendidikan inklusif bagi anak *low vision* dapat berjalan dengan baik dan berhasil, apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sikap dan keyakinan yang positif dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak *low vision*;
 - b. Tersedia program untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak *low vision*;
 - c. Tersedia peralatan khusus dan teknologi asistif untuk mengakses program kurikuler bagi anak *low vision*;
 - d. Lingkungan fisik diadaptasikan agar lebih aksesibel bagi anak *low vision*;
 - e. Dukungan sistem yang memadai bagi terlaksananya pendidikan inklusif bagi anak *low vision*;
 - f. Kolaborasi yang konstruktif diantara petugas terkait di lapangan, terutama para guru kelas reguler, guru pendamping, dan orang tua;
 - g. Metode pengajaran yang mengakomodasi semua peserta didik, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik *low vision*;
 - h. Dukungan masyarakat yang baik melindungi dan memperlancar pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak *low vision*.
9. Perlu adanya pelayanan pendidikan bagi anak *low vision* yang komprehensif, sistematis, terencana, profesional dan berakar dari nuansa inklusi dan kekuatan kita sendiri, sehingga terlayannya seluruh anak *low vision* dalam pendidikannya.

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada khalayak dan masyarakat pada umumnya dan praktisi pendidikan khususnya, dan sekolah reguler yang ada ABK-nya, serta para *stake holder*. Saran ini dimaksudkan untuk menuntaskan masalah layanan pendidikan bagi anak *low*

vision pada umumnya dan khususnya layanan pendidikan inklusif.

1. Dilakukan penjaringan secara kontinyu yang meliputi penemuan dan jumlah anak *low vision*, bagaimana menemukannya, di mana mereka berada (apakah di masyarakat, di rumah, di rumah sakit mata, dll.), siapa yang melaksanakannya, dan bagaimana jaringan kerjanya.
2. Dilakukan penilaian penglihatan dan latihan pengembangan sisa penglihatan fungsional oleh tenaga ahli yang kompeten dan tenaga/guru yang telah dilatih untuk itu.
3. Diupayakan layanan pendidikan kebutuhan khusus dan pendidikan inklusif bagi anak *low vision*, agar mereka terpenuhi haknya sebagai anak dan warga masyarakat.
4. Disediakan tenaga yang berkompentensi melayani kebutuhan khusus anak *low vision*. Seperti guru kelas reguler yang telah dilatih, guru pembimbing khusus, guru pendamping atau helper, dan tenaga ahli lain yang kompeten.
5. Disediakan alat bantu *low vision* yang memadai dan mengkondisikan lingkungan yang aksesibel bagi semua peserta didik termasuk anak *low vision*.
6. Hendaknya dibentuk jaringan kerja antara pemegang kebijakan, guru kelas reguler, guru pembimbing khusus, orang tua, organisasi penyandang cacat, dan orang yang terlibat dalam layanan pendidikan inklusif bagi anak *low vision*.
7. Pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya ada anak *low vision* hendaknya mempertimbangkan aktifitas kurikulum yang dirancang memperhatikan faktor-faktor pencahayaan (intensitas, arah), kontras (warna), ukuran (besar kecilnya), jarak (objek dengan penglihatan), dan posisi (letak objek agar bisa dilihat dengan jelas).

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, D. (1999). "*Low Vision Devices for Children and Young People with a Visual Impairment*" dalam Mason, H. & McCall, S. (Eds.). (1999, pp.64-76). *Visual Impairment: Access to Education for Children and Young People*. London: David Fulton Publishers. (diterjemahkan oleh: Didi Tarsidi)
- Birny, (2008). [Jumlah anak berkebutuhan khusus \(ABK\) putus sekolah di Jabar tinggi. Bandung: Pikiran Rakyat, 24 Nopember 2008. tersedia: http://birdieni.blog.friendster.com/](http://birdieni.blog.friendster.com/)
- Depsos RI., (2003). *Panduan Pelaksanaan Keterampilan Kehidupan Sehari-hari Penyandang Cacat Netra*. Jakarta: Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra
- Dijk, Karin van, dan Riyanto, Agus T. (2007). *Layanan Kesehatan Mata sebagai Prasyarat untuk Keberhasilan Inklusi*. [EENET asia Newsletters: Edisi Keempat Juni 2007. Tersedia: http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter4_indonesia/page20.php](http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter4_indonesia/page20.php)
- Hosni, Irham, (2007). *Layanan Terpadu Low Vision dalam Mendukung Inklusi*. Model Pusat Layanan Terpadu low vision YPWG kerjasama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan RS Mata Cicendo. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Ditjen Menejemen Dikdasmen, Depdiknas
- Mason, H. (1999). "*Common Eye Defects and their Educational Implications*". In: Mason, H. & McCall, S. (Eds.). (1999, pp.38-51). *Visual Impairment: Access to Education for Children and Young People*. London: David Fulton Publishers. (diterjemahkan oleh: Didi Tarsidi). Tersedia: <http://d-tarsidi.blogspot.com/2008/06/kelainan-mata-yang-umum-dan.html>
- Sunanto, Juang, (1999). *Asesmen Fungsi Penglihatan pada Low Vision*. Disampaikan pada Lokakarya tentang Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Low Vision, 22 Desember 1999. Bandung. Jurusan Pendidikan Luar Biasa, FIP-UPI
- Sugiarti, (2008). *Vision 2020 The Right to Sight*. Disampaikan dalam seminar sehari. Bandung: Syamsi Dhuha
- Susanti, Reh Atemalem, (2007). *45 Juta Orang di Dunia Buta*. Kamis, 25 Oktober 2007. Jakarta: Tempo Interaktif. Tersedia: <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/10/25/brk,20071025-110097.id.html>
- Tobin, M. (1999). "Assessment Procedures". In: Mason, H. & McCall, S. (Eds.). (1999, pp.76-85). *Visual Impairment: Access to Education for Children and Young People*. London: David Fulton Publishers. (diterjemahkan oleh: Didi Tarsidi). Tersedia: <http://d-tarsidi.blogspot.com/2008/06/prosedur-asesmen-penglihatan.html>

-----*Garapan Pendidikan Khusus, Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Tersedia:
<http://www.pljabar.com/?inc=tentang&id=5>

